



# **LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2017**

**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH**  
Jl. Tgk. Chik Kuta Karang No. 3 Banda Aceh

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang melaporkan hal-hal penting yang menjadi lingkup tanggung jawab instansi, mencakup capaian sasaran pembangunan atau pencapaian sasaran-sasaran strategis di tingkat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

LKJIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini setiap SKPA dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan public.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh disusun berdasarkan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 tahun 2012 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012.

LKjIP merupakan sarana Akuntabilitas bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk mengukur pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengelolaan dinas dan sumber daya yang dimiliki dalam rangka mencapai visi, misi serta tujuan dan sasaran kerja sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2012-2017, dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan LKjIP Tahun 2017 adalah :

- a. Dapat diketahuinya kegiatan yang telah dilaksanakan;
- b. Dapat diketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan beserta hasil evaluasi;
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
- d. Sebagai perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi.

Penyusunan LKjIP Tahun 2017 ini adalah untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) melalui DPA APBA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh berkedudukan dibawah Pemerintah Aceh dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Pemerintah Aceh melalui Sekretaris Daerah. Dalam mengemban tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh berupaya melestarikan dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan khasanah kebudayaan dan warisan budaya di daerah Provinsi Aceh.

Demi mencapai maksud dan tujuan tersebut, berbagai Program/Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dengan memperhatikan aspek pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya Aceh yang Islami serta potensinya sebagai sumber daya industri yang dapat mendorong ekonomi masyarakat.

Adapun tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata secara Islami sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dimaksud maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata di daerah;
4. Pembinaan teknis di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota;
5. Pemberian Rekomendasi perizinan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata lintas Kabupaten/Kota;
6. Pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
7. Pengawasan dan Pengendalian di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
8. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Agar dapat menjalankan fungsi dan tugas pokok di atas maka Pemerintah memberikan beberapa kewenangan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk :

1. melestarikan museum, swaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah, nilai tradisional dan pengembangan bahasa serta budaya daerah;
2. menyusun program kerja di bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia potensial di bidang kebudayaan dan pariwisata;
4. mengembangkan dan menata objek dan sarana di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan Syariat Islam;
5. mempromosikan dan memasarkan produk pariwisata; dan
6. memberikan rekomendasi perizinan atraksi/pertunjukan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

### **C. ASPEK STRATEGIS**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Periode Tahun 2012-2017, dimana rencana pengembangan pembangunan kebudayaan dan pariwisata memprioritaskan Dinul Islam, Adat dan Budaya.

Aceh memiliki 903 obyek wisata, termasuk didalamnya obyek wisata alam, wisata budaya serta wisata minat khusus yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Potensi tersebut telah menarik kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara ke Aceh. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir (2012-2016) jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh terus meningkat dengan rata-rata peningkatan 19,83 % pertahun. demikian pula kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Aceh.

Struktur PDRB Aceh baik dengan migas maupun tanpa migas menunjukkan bahwa tiga lapangan usaha yang disepakati sebagai indikator PDRB pariwisata yaitu : penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa-jasa lainnya terus naik dengan rata-rata kenaikan 10% pertahun. Hal ini tentunya didukung oleh peningkatan jumlah usaha pariwisata di Aceh untuk memenuhi kebutuhan akomodasi wisatawan.

**Tabel : 1.1**  
**Pertumbuhan Usaha Hotel di Aceh Tahun 2012-2016**

Tahun	HOTEL		Jumlah Hotel	Jumlah Kamar
	Hotel Bintang	Non Bintang		
2012	33	274	307	5306
2013	31	311	342	6180
2014	36	324	360	6216
2015	34	377	411	7390
2016	32	430	462	7720

Sumber : Data Statistik Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2016

Adapun yang menjadi isu strategis pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Aceh adalah sebagai berikut:

I. Isu strategis Bidang Kebudayaan

1. Lemahnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan bidang budaya;
2. Perilaku budaya masyarakat Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan nilai, adat istiadat & budaya Aceh yang bersifat Islami;
3. Lemahnya perhatian Pemerintah & masyarakat dalam pelestarian khazanah seni tradisional, sastra budaya & patenisasi seni budaya Aceh;
4. Lemahnya penataan, pemeliharaan, pemanfaatan & pendataan situs & cagar budaya Aceh, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi;
5. Belum maksimalnya pemanfaatan aset budaya secara optimal;
6. Rendahnya SDM dalam pengelolaan peninggalan sejarah & budaya lokal;
7. Rendahnya minat masyarakat untuk mengunjungi Museum Aceh.

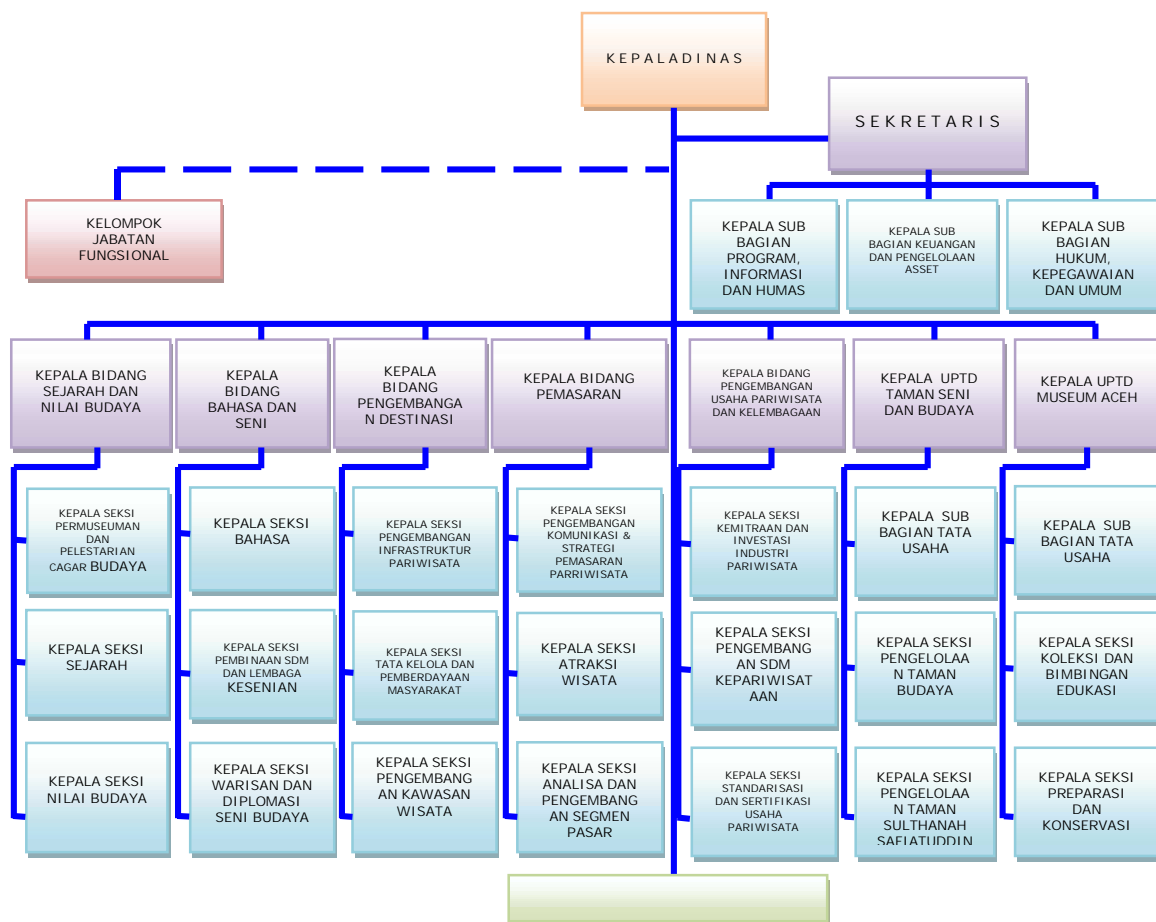
II. Isu strategis Bidang Pariwisata

1. Lemahnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan & evaluasi;
2. Belum optimalnya pembangunan kawasan wisata;
3. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana;
4. Kurangnya promosi kepariwisataan secara regional, nasional & internasional;
5. Belum optimal pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi & informasi;
6. Belum tertatanya objek-objek wisata: *alam, agro, budaya & minat khusus*;
7. Pengelolaan *DTW* belum optimal & berdampak pada PAD;
8. Kurangnya penyelenggaraan event promosi budaya & pariwisata;

9. Pemanfaatan aset budaya daerah: *Taman Seni dan Budaya, Taman Sulthanah Safiatuddin & Museum Aceh*;
10. Belum optimalnya pemanfaatan objek wisata sejarah;
11. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata.

#### D. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh memiliki Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang terdiri dari: 1 (satu) orang eselon II/a, 8 (delapan) orang eselon III/a dan 24 (dua puluh empat) eselon IV/a, dengan Struktur Organisasi sebagai berikut:



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, memiliki kewenang sesuai bidang dan seksi (jumlah Bidang/Bagian 6, serta jumlah UPTD 2) untuk melakukan peningkatan pengembangan kebudayaan dan pariwisata di Aceh, dengan tugas dan fungsi masing-masing yaitu :

1. Sekretariat mempunyai fungsi yaitu :
  - a. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
  - b. Penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN dan sumber lainnya;
  - c. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
  - d. Penyiapan data dan informasi di bidang pelaksanaan kebudayaan dan pariwisata;
  - e. Pelaksanaan fungsi kehumasan di bidang pelaksanaan kebudayaan dan pariwisata;
  - f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
  - g. Penyusunan rencana strategis, pelaporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja dinas kebudayaan dan Pariwisata;
  - h. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan rumahtangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan;
  - i. Pengelolaan administrasi keuangan;
  - j. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan; dan
  - k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai tugas dan fungsinya.
  
2. Bidang Sejarah dan Nilai Budaya mempunyai fungsi yaitu :
  - a. Pelaksanaan pengembangan, pembinaan, pelestarian dan pemanfaatan permuseuman dan pelestarian benda cagar budaya;
  - b. Pelaksanaan pengembangan, pembinaan, pelestarian dan pemanfaatan sejarah;



- c. Pelaksanaan pengembangan, pembinaan, pelestarian dan pemanfaatan nilai budaya; dan
  - d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
3. Bidang Bahasa dan Seni mempunyai fungsi yaitu :
- a. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemanfaatan dan pelestarian bahasa;
  - b. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemanfaatan sumber daya manusia dan lembaga kesenian;
  - c. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemanfaatan dan pelestarian warisan dan diplomasi seni budaya; dan
  - d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pengembangan Destinasi mempunyai fungsi yaitu :
- a. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pemeliharaan;
  - b. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan objek wisata;
  - c. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
  - d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengembangan destinasi pariwisata; dan
  - e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Pemasaran mempunyai fungsi yaitu :
- a. Pelaksanaan analisa pasar, promosi dan pemasaran pariwisata daerah;
  - b. Penyelenggaraan kegiatan atraksi wisata daerah;
  - c. Pelaksanaan publikasi dan pelayanan informasi wisata;
  - d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemasaran pariwisata; dan
  - e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata mempunyai fungsi yaitu :
  - a. Pelaksanaan dan pengembangan usaha pariwisata;
  - b. Pelaksanaan dan pengembangan hubungan kerjasama antar lembaga dalam upaya meningkatkan peluang investasi bidang usaha pariwisata;
  - c. Pengendalian dan pengawasan usaha pariwisata;
  - d. Pemberian rekomendasi perizinan usaha pariwisata dan standarisasi produk usaha pariwisata;
  - e. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan usaha pariwisata; dan
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Disbudpar Aceh sebagai berikut :

7. UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh mempunyai fungsi yaitu :
  - a. penyusunan program perencanaan di bidang seni dan budaya;
  - b. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
  - c. pelaksanaan pengolahan dan eksperimentasi terhadap karya seni dan budaya;
  - d. penyelenggaraan pagelaran, pementasan, pertunjukan dan pameran seni dan budaya;
  - e. pelaksanaan latihan, ceramah, seminar, sarasehan dan diskusi seni dan budaya;
  - f. penyelenggaraan perpustakaan, dokumentasi, publikasi, promosi dan pemasaran seni dan budaya
  - g. pengelolaan Taman Budaya;
  - h. pengelolaan Taman Sulthanah Shafiatuddin; dan
  - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
8. UPTD Museum Aceh mempunyai fungsi yaitu :
  - a. Penyusunan program perencanaan di bidang pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan benda-benda yang bernilai budaya dan ilmiah;
  - b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
  - c. Pelaksanaan penelitian, penerbitan, dan penyeberluasan hasil penelitian benda-benda warisan budaya dan ilmiah;

- d. Pelaksanaan peningkatan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya sebagai sumber primer pengetahuan sejarah dan budaya;
- e. Pelaksanaan penyajian, penyebaran informasi, publikasi tentang benda-benda warisan budaya dan ilmiah;
- f. Pemberian bimbingan edukasi tentang benda-benda warisan budaya dan ilmiah yang bersifat rekreatif;
- g. pelaksanaan pameran benda-benda warisan budaya dan ilmiah yang bersifat lokal, regional, nasional, dan internasional, pameran keliling, museum masuk sekolah, wisatabudaya pelajar, festival, lomba, dan sayembara tentang benda-benda warisan budaya dan permuseuman;
- h. Pengelolaan dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;
- i. Pelaksanaan pelayanan referensi, penelitian, praktek kerja lapangan dan pelayanan informasi budaya; dan
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Sampai dengan akhir tahun 2017 jumlah pegawai pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebanyak 263 orang dengan perincian sejumlah 200 orang berstatus Pegawai Negari Sipil (PNS) dan 55 orang merupakan Tenaga Kontrak serta Tenaga Bakti 8 orang. Secara lebih terperinci berkaitan dengan kualifikasi pendidikan, golongan ruang dan jabatan struktural dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel : 1.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi SDM dan Pendidikan**

Kualifikasi SDM	Jenjang Pendidikan										Jumlah
	SD	SMP	SMA	D-I	D-II	D-III	D-IV	S.1	S.2	S.3	
PNS	4	3	63	-	-	17	3	93	17	-	200
Tenaga Kontrak	-	3	40	-	-	2	-	10	-	-	55
Tenaga Bakti	-	-	3	-	-	-	-	5	-	-	8
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>108</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>263</b>

**Tabel: 1.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi SDM dan Golongan Ruang**

No	Kualifikasi SDM	Golongan Pegawai				Staf ADM	Satpam	Cleaning Service	Jumlah
		I	II	III	IV				
1	PNS	4	45	136	15	185	15	-	200
2	Tenaga Kontrak	3	42	10	-	10	17	28	55
3	Tenaga Bakti	-	3	5	-	8	-	-	8
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>90</b>	<b>151</b>	<b>15</b>	<b>203</b>	<b>32</b>	<b>28</b>	<b>263</b>

**Tabel: 1.4**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi SDM dan Jabatan Struktural**

No	Kualifikasi SDM	Eselonering				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	1
2	Sekretaris/Kepala Bidang	-	-	6	-	6
3	Kepala UPTD	-	-	2	-	2
4	Kasubbag/Kasi	-	-	-	18	18
5	Kasubbag/Kasi UPTD	-	-	-	6	6
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>33</b>

Sarana pendukung lainnya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh berupa :

**Tabel : 1.5 Kondisi Sarana dan Prasarana**

No	Sarana dan Prasarana	Volume	Baik	Rusak	Rusak Berat	Ket
1	Mobil Dinas	13 Unit	6	-	7	
2	Sepeda Motor	9 Unit	8	-	1	
3	Komputer	94 Unit	92	-	2	
4	Printer	102 Unit	102	-	-	
5	UPS	34 Unit	31	2	1	
6	Mesin Absensi	7 Unit	7	-	-	
7	Mesin Tik Manual	21 Unit	16	-	5	
8	Meja	99 Unit	85	14	-	
9	Kursi	202 Unit	182	19	1	
10	Filling Kabinet	35 Unit	32	1	2	
11	Brangkas	4 Unit	4	-	-	
12	Handy Talky (HT)	17 Unit	17	-	-	
13	Kamera Saku	23 Unit	20	1	2	
14	Kamera Video (Professional Camcorder)	16 Unit	16	-	-	
15	AC (Split & Standing)	89 Unit	85	4	-	
16	Kipas Angin	5 Unit	5	-	-	
17	Laptop	64 Unit	62	-	2	
18	Mesin Photo Copy	1 Unit	1	-	-	
19	Mesin Potong Rumput	22 Unit	22	-	-	
20	Mesin Penghisap Debu (Vacum Cleaner)	6 Unit	6	-	-	
21	Pompa Air	9 Unit	9	-	-	
22	Sepeda	2 Unit	2	-	-	
23	Kalkulator	3 Unit	1	-	2	
24	Handy Cam	15 Unit	15	-	-	
25	Lemari	49 Unit	45	-	4	
26	Lemari Es (Kulkas)	3 Unit	3	-	-	
27	Generator Listrik (Genset)	1 Unit	1	-	-	
28	Televisi	17 Unit	17	-	-	
28	Infocus	16 Unit	15	1	-	

## E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh selama tahun 2017. Capaian kinerja (*Performance result*) 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Oleh karenanya sistematika penyajian LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2017, dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan, Menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, uraian singkat mandat yang dibebankan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh (gambaran umum tupoksi), struktur organisasi, serta sistematika penyajian.

Bab II, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan mengenai muatan rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk periode 2012-2017, indikator kinerja utama (IKU), dan penetapan kinerja untuk tahun 2017.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menyangkut pencapaian sasaran-sasaran strategis Dinas dengan cara menyajikan uraian hasil pengukuran capaian indikator kinerja utama, pengukuran capaian kinerja tahun 2017, serta akuntabilitas keuangan. Mengevaluasi mengenai keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh di tahun berikutnya secara berkelanjutan.

Bab IV – Penutup, mengemukakan kesimpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2017 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Sebagai perpanjangan tugas pemerintah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh berusaha melaksanakan segala tugas yang diemban dengan sebaik mungkin, melalui perencanaan yang terprogram dan mengakomodir harapan semua pihak terutama masyarakat tani.

#### **A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2012-2017**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2012 s/d 2017, pada hakikatnya memuat kebutuhan dari visi dan misi Gubernur Kepala Pemerintahan Aceh serta visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Visi dan Misi tersebut dituangkan pada tujuan kegiatan, rencana capaian kegiatan dan hasil kegiatan yang meliputi berbagai langkah yang telah dan akan dilakukan serta skala prioritas program maupun kebijakan.

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh juga memperhatikan prinsip responsibilitas, sinergis dan akuntabel dengan mengacu kepada dokumen resmi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berisikan tentang kebijakan pengambilan keputusan dan perencanaan pengembangan pembangunan. Program-program yang ditawarkan didalamnya, berisikan tentang harapan-harapan masyarakat khususnya dan juga program-program pembangunan daerah umumnya (Provinsi, Kabupaten dan Nasional).

#### **1. Visi dan Misi**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh telah menetapkan Visi dan Misi untuk dapat diselaraskan dengan peluang, potensi dan tantangan yang akan dihadapi, sekaligus sebagai tolok ukur capaian kinerja dibandingkan dengan Renstra yang telah disusun sebagai berikut;

#### **VISI**

***“ACEH DESTINASI WISATA SYARIAH UNGGULAN  
DI ASIA TENGGARA 2017”.***

## **MISI**

- Melakukan upaya pemeliharaan dan penguatan nilai-nilai budaya menuju penerapan Dinul Islam.
- Melestarikan, mendayagunakan dan memanfaatkan wisata budaya, nilai-nilai syariat dan kawasan wisata unggulan.
- Membangun jiwa kewirausahaan, kompetensi, dan kerjasama terpadu antar pelaku budaya dan usaha pariwisata.
- Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengembangan budaya dan pariwisata.
- Menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam berbagai event, serta mempromosikan kegiatan kebudayaan dan pariwisata.

## **Rumusan Visi – Misi**

- Terpelihara nilai-nilai budaya dan dinul Islam dalam kehidupan masyarakat.
- Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian, perlindungan, pendayagunaan dan pemanfaatan warisan budaya, nilai-nilai syariah dan kawasan wisata alam unggulan.
- Tersedia dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, terjalannya kerjasama para pemangku kepentingan, serta terbangunnya jiwa kewirausahaan bidang kebudayaan dan pariwisata.
- Terbangunnya kesadaran, kepedulian dan rasa memiliki masyarakat lingkungan situs budaya, budayawan dan seniman, komunitas dan tokoh adat, pelaku industri pariwisata dan masyarakat lingkungan objek wisata.
- Terselenggara dan ikut serta pada berbagai event, serta promosi potensi budaya dan kepariwisataan.

## **2. Sasaran dan Target**

Sasaran program pada tahun 2017 atau Tahun ke 5 Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh 2012-2017 adalah sebagai berikut:

- Tumbuhnya citra positif wisatawan terhadap Aceh sebagai daerah tujuan wisata syariah berbasis budaya dan alam unggulan
- Terciptanya daya tarik budaya dan pariwisata dalam rangka peningkatan kunjungan wisatawan dan investor



- Terciptanya kerjasama antar lembaga budaya, partisipasi pelaku industri pariwisata dan pemangku kepentingan dan partisipasi pada event-event budaya dan pariwisata lainnya dalam dan luar negeri
- Terselenggaranya event-event budaya dan pariwisata dalam dan luar negeri, serta promosi melalui media cetak, media elektronik, media internet dan media outdoor (luar ruang).

Target kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, yang terangkum pada Renstra 2012 s/d 2017 sebagai berikut :

1. Terpeliharanya dan teramalkannya nilai-nilai budaya dan Dinul Islam dalam kehidupan masyarakat.
2. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian, perlindungan, pendayagunaan dan pemanfaatan warisan budaya, nilai-nilai Syariat Islam dan tersedianya kawasan wisata alam unggulan.
3. Tersedia dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, terjalannya kerjasama para pemangku kepentingan, serta terbangunnya jiwa kemandirian berusaha bidang kebudayaan dan pariwisata.
4. Terbangunnya kesadaran, kepedulian dan rasa memiliki masyarakat terhadap lingkungan situs budaya, peningkatan wawasan pengetahuan para budayawan dan seniman, komunitas dan tokoh adat, meningkatnya jumlah pelaku industri pariwisata dan masyarakat lingkungan objek wisata.
5. Terselenggara dan ikut serta pada berbagai event, serta promosi potensi budaya dan wisata.

### **3. Strategi, Kebijakan dan Program**

Untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan, Dinas Kebudayaan dan pariwisata Aceh memiliki strategi, kebijakan dan program sebagai berikut;

Strategi yang ditetapkan dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata Aceh:

1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia bidang kebudayaan dan pariwisata.
2. Peningkatan kerja sama antar para pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan pariwisata.
3. Membangun jiwa kewirausahaan dan ekonomi kreatif bidang kebudayaan dan pariwisata.

4. Melakukan standarisasi dan sertifikasi pelaku dan produk budaya dan pariwisata.

Kebijakan dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata Aceh:

1. Pengembangan sumber daya manusia bidang kebudayaan dan pariwisata.
2. Melakukan upaya peningkatan jalinan kerjasama dan sinergisitas antar para pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan pariwisata.
3. Melakukan upaya pengembangan sumber daya manusia yang mempunyai jiwa kewirausahaan dan ekonomi kreatif bidang kebudayaan dan pariwisata.
4. Penerapan standarisasi dan sertifikasi pelaku dan produk budaya dan pariwisata.

Sesuai dengan Renstra 2012-2017, program dan kegiatan utama yang telah dijabarkan untuk tahun 2017 diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Peningkatan Disiplin Aparatur.
- d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- e. Pengembangan Nilai Budaya.
- f. Pengelolaan Kekayaan Budaya.
- g. Pengelolaan Keragaman Budaya.
- h. Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan.
- i. Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
- j. Pengembangan Destinasi Pariwisata.
- k. Pengembangan Kemitraan.

## **B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh diperlukan sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, rencana kerja dan anggaran, pemantauan dan pengendalian kinerja dan kegiatan, serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja. IKU atau *Key Performance Indicators* (KPI) dapat diartikan sebagai ukuran

atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana suatu instansi telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

IKU Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh adalah serangkaian tujuan yang terukur yang telah ditetapkan dan dianggap penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan kebudayaan dan pariwisata khususnya di lingkungan Pemerintah Aceh. Berikut adalah IKU Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

**Tabel 2.1**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA /CARA PENGUKURAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata yang proporsional dan professional.	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan tahun ini dibandingkan dengan jumlah wisatawan tahun lalu	Untuk memenuhi target Renstra dan RPJMA tahun 2017 - 2022	Laporan kegiatan, survey/monitoring, data statistik BPS, Disbudpar Aceh dan Kantor Imigrasi Klas I Banda Aceh	

### C. PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja pada hakekatnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada.

Tujuan penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Penetapan Kinerja tahun 2017 mempertimbangkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), rata-rata pencapaian tahun sebelumnya dan dukungan anggaran program/kegiatan pada tahun berjalan dalam menetapkan target pencapaian indikator kinerja. Berdasarkan hal-hal tersebut ditetapkanlah target untuk beberapa indikator kinerja sebagaimana terlampir dalam Tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Pendayagunaan dan pemanfaatan warisan budaya, nilai-nilai syariah dan kearifan lokal sebagai sarana pendidikan, penelitian, identitas bangsa dan kepariwisataan.	1. Peningkatan aktivitas pelestarian seni budaya yang berskala nasional dan International 2. Pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya 3. Jumlah grup kesenian yang dibina	9 kegiatan  12 situs  99 sanggar
2	Terlaksananya pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang proporsional dan profesional yang berkelanjutan guna peningkatan kunjungan wisata.	Kunjungan wisatawan 1. Kunjungan wisatawan nusantara 2. Kunjungan wisatawan mancanegara 2. Jumlah objek dan daya tarik wisata unggulan yang dikembangkan	2.389.467 orang  100.000 orang  13 objek

Secara umum indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2017 sama dengan tahun 2016, hanya saja terdapat penyesuaian pada angka target dan sumber data.

Beberapa indikator ditetapkan dengan target yang meningkat yaitu;

- Peningkatan target pada aktivitas Pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya dengan adanya penambahan anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Peningkatan jumlah sanggar yang dibina menyesuaikan dengan meningkatnya jumlah sanggar yang mendapatkan pembinaan baik dalam bentuk bantuan alat/sarana kesenian maupun melalui keterlibatannya dalam beberapa kegiatan seni dan budaya yang berskala nasional dan internasional.
- Pada indikator kunjungan wisatawan dibagi menjadi wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara (secara persentase setara dengan kenaikan sebesar 15% dari realisasi tahun 2016) yang diharapkan dapat mengejar target kunjungan yang diamanahkan dalam RPJMA dan memberikan kontribusi terhadap akselerasi target kunjungan nasional.
- Indikator jumlah objek dan daya tarik wisata yang dikembangkan juga meningkat dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar 13 odtw , dengan kegiatan peningkatan fasilitas wisata sebanyak 5 odtw dan peningkatan sarana pada 8 odtw.

Sedangkan indikator yang ditetapkan dengan target yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya adalah;

- Indikator kegiatan aktivitas pelestarian seni dan budaya yang mengalami pengurangan karena keterbatasan anggaran tahun 2017 untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Sasaran-sasaran kinerja yang telah dirumuskan pada tahun 2017, selanjutnya dituangkan kedalam 7 (tujuh) program kerja utama yaitu; (1) Program Pengembangan Nilai Budaya, (2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, (3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya, (4) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan, (5) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, (6) Program Pengembangan Destinasi Wisata, dan (7) Program Pengembangan Kemitraan.

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

#### A. PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2017 secara umum terealisasi dengan baik, berikut adalah tabel pengukuran capaian IKU Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh:

**Tabel: 3.1**  
**CAPAIAN RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2017		CAPAIAN (%)
			TARGET	REALISASI	
1	2	3			
1	Pendayagunaan dan pemanfaatan warisan budaya, nilai-nilai syariah dan kearifan lokal sebagai sarana pendidikan, penelitian, identitas bangsa dan kepariwisataan.	1. Peningkatan aktivitas pelestarian seni budaya yang berskala nasional dan internasional. 2. Pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya. 3. Jumlah grup kesenian yang dibina.	9 kegiatan  12 situs  99 sanggar	9 kegiatan  12 situs  126 sanggar	100%  100%  127%
2	Terlaksananya pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang proporsional dan professional yang berkelanjutan guna peningkatan kunjungan wisata.	Kunjungan wisatawan 1. Kunjungan wisatawan nusantara 2. Kunjungan wisatawan mancanegara 2. Jumlah objek dan daya tarik wisata unggulan yang dikembangkan	2.389.467 orang 100.000 orang 13 objek	2.288.625 orang 75.758 orang 14 objek	96 % 76 % 107%

## **B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Aceh pada tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, serta membandingkan hasil capaian Tahun 2017 dengan tahun-tahun sebelumnya pada beberapa indikator. Rincian hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator tersebut secara lebih rinci akan diilustrasikan dengan menggunakan tabel-tabel dalam analisis capaian kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 secara umum sasaran-sasaran strategis dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sudah dapat terealisasi dengan baik, bahkan beberapa diantaranya melampaui target yang ditetapkan.

## **C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah sasaran-sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh serta penjabaran pencapaiannya:

- **Pendayagunaan dan Pemanfaatan Warisan Budaya, Nilai-nilai Syariah dan Kearifan Lokal Sebagai Sarana Pendidikan, Penelitian, Identitas Bangsa dan Kepariwisata**

Sasaran ini dicapai melalui :

- (1) Program Pengembangan Nilai Budaya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan sasaran adalah Pelestarian dan Aktualisasi Adat dan Budaya daerah dengan penyelenggaraan Festival Kuliner Aceh, Festival Kuliner dan kopi Sail Sabang, Buku Resep Kuliner Tradisional Aceh, Aceh Islamic Fashion, Karnaval Budaya Sail Sabang ; Pagelaran, Pameran Seni se-Sumatera (PPSS), Pagelaran dan Pameran Seni Temu Taman Budaya se-Indonesia; Pengumpulan dan Ganti Rugi Koleksi Museum, Pameran Bersama Tingkat Nasional dan Regional, Pameran Keliling dan Temporer;
- (2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan kegiatan: Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno, Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah, Pengelolaan dan

Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air, Penyusunan, pengendalian dan evaluasi program, Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana/prasarana Taman Ratu Safiatuddin, Pemugaran benda-benda arkeologi, benda cagar budaya peninggalan sejarah, Penyediaan Bahan Bacaan tentang Sejarah.

- (3) Program pengelolaan keragaman budaya dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut ; Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan, Seminar dalam Rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal, Pembinaan Evaluasi Sanggar-Sanggar Kesenian, Pagelaran dan Festival Tingkat Nasional, Rapat Koordinasi Kebudayaan, Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara, Festival seni dan pagelaran budaya, Pagelaran budaya daerah pada event dalam dan luar negeri, Partisipasi museum Aceh diluar dan dalam daerah
- (4) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana kebudayaan dengan kegiatannya Penyediaan Alat-alat kesenian Tradisional.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meliputi 3 (Tiga) indikator, yaitu; (1) Peningkatan aktivitas pelestarian seni budaya yang berskala nasional dan internasional (2) Pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya dan (3) Jumlah grup kesenian yang dibina. Pencapaian target masing-masing indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Tabel 3.2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian				Target Akhir RPJM (2017)
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	
Pendayagunaan dan pemanfaatan warisan budaya, nilai-nilai syariah dan kearifan lokal sebagai sarana pendidikan, penelitian, identitas bangsa dan kepariwisataan.	Peningkatan aktivitas pelestarian seni budaya yang berskala nasional dan internasional	-	4	10	9	-	10	10	9	-	250	100	100	27*
	Pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya	194	14	10	12	643	43	11	12	331	307	100	100	73**
	Jumlah grup kesenian yang dibina.	50	30	60	99	91	110	109	126	182	360	182	127	50

\* Target rancu karena merupakan keseluruhan kegiatan tanpa membedakan skala (lokal, nasional, internasional)

\*\* Target adalah akumulasi jumlah situs sampai dengan tahun n rata-rata target pertahun hanya 5 situs

Dari tabel 3.2 terlihat bahwa secara umum target indikator kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2017 dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 terlaksana dengan baik.

- Indikator aktivitas pelestarian seni budaya yang berskala Nasional dan Internasional. Tahun 2017 telah dilaksanakan 2 (dua) kegiatan berskala Internasional dan 7 (tujuh) kegiatan berskala Nasional. Kegiatan yang berskala Internasional yaitu; Aceh International Halal Food Festival yang bertujuan untuk melestarikan kekayaan kuliner Aceh sekaligus mempromosikannya secara luas kepada para wisatawan baik domestic maupun mancanegara, pada kegiatan ini Aceh kembali mendapatkan Rekor MURI dalam kategori Pembawa Idang Talam terbanyak sebesar 1.074 Pria Pembawa Idang Talam ; Sail Sabang 2017 yang mengangkat tema “ Menuju Sabang Gerbang Tujuan Wisata Bahari Dunia “. Event ini menjadi kesempatan yang amat baik untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk mempromosikan keindahan Destinasi di Sabang dan juga di Aceh secara umum. Event ini diikuti oleh peserta dari National dan International. Sedangkan kegiatan yang berskala Nasional adalah; PENAS yang diikuti oleh

50.000 peserta dari seluruh Indonesia; Pameran dan Pertunjukan Seni Se Indonesia, Aceh Islamic Fashion, Karnaval Nusantara, Binale, Pan Musik Kolaborasi Ensemble se-Sumatera, Festival Kopi dan kuliner Sail Sabang. Pada tahun 2017 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh juga menerima Sertifikat Penetapan “Warisan Budaya Tak Benda Indonesia” untuk 5 jenis kesenian Aceh yaitu : Rapai Grimpheng Aceh Pidie, Rapai Pasee Aceh Utara, Pasenatken Aceh Tenggara, Landok Sampot Aceh Selatan dan Payung Meshikat Aceh Tenggara, sehingga sampai dengan Tahun 2017 telah ditetapkan 25 jenis kesenian/budaya Aceh yang mendapatkan sertifikat warisan budaya tak benda nasional/internasional.

Apabila membandingkan indikator-indikator kinerja pada sasaran strategis pertama terhadap target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) akan sedikit berbeda dalam hal pencapaiannya. Indikator aktivitas pelestarian seni budaya dalam RPJMA (2017) tidak dibatasi pada skala nasional dan internasional sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja (PK), sehingga seluruh kegiatan festival dan pagelaran seni dan budaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh pada tahun 2017 adalah sebanyak 30 kegiatan. Jumlah ini jika dibandingkan dengan amanah RPJM memenuhi 111% tanpa membedakan skala kegiatannya.

- Indikator pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya pada tahun 2017 telah dilakukan terhadap 12 situs dalam bentuk: kegiatan fisik di 11 (sebelas) situs, kajian arkeologi terhadap 1 (satu) benda cagar budaya (kajian Sarkofagus).

Membandingkan Indikator pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya dalam amanah RPJM (2017) ditargetkan untuk mencapai angka akumulasi sampai dengan tahun 2017 sebanyak 73 buah, sedangkan pada tahun 2017 akumulasi jumlah situs yang telah diintervensi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh baik melalui program fisik, konservasi, kajian dan registrasi sudah mencapai angka 128 buah atau setara dengan 175% dari target RPJM.

- Indikator pembinaan sanggar pada tahun 2017, telah melibatkan 126 (seratus dua puluh enam) sanggar melalui bentuk kegiatan pembinaan sebagai berikut; pemberian bantuan alat/perengkapan sanggar sebanyak 9 (sembilan) sanggar, Festival, Pagelaran dan Perlombaan melibatkan 117 (seratus tujuh belas) sanggar dan kelompok musik.

Indikator pembinaan sanggar, dalam amanah RPJMA (2017) adalah sebanyak 50 sanggar pertahun sehingga realisasi yang dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh pada tahun 2017 mencapai angka 252% karena telah membina 126 sanggar melalui berbagai kegiatan festival, pagelaran , lomba dan bantuan alat/perengkapan sanggar.

- **Terlaksananya Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata yang Proporsional dan Profesional yang berkelanjutan guna peningkatan Kunjungan Wisata**

Sasaran ini dicapai melalui (1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan sasaran adalah Peningkatan Pemanfaatan Tehnologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata, Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam dan Luar Negeri, Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu, (2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan, Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata, Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan, Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi, Pembuatan Masterplan Pengembangan Kawasan Wisata dan (3) Program Pengembangan Kemitraan dengan kegiatan-kegiatan - Pengembangan dan Penguatan Informasi Dan Database, Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya, Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini adalah jumlah kunjungan wisatawan dan objek wisata unggulan yang dikembangkan.

Pencapaian target kinerja tersebut dapat digambarkan oleh tabel berikut :

**Tabel 3.3**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian				Target Akhir RPJM (2017)
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	
Peningkatan jalinan kerjasama dan sinergitas antara para pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	1.418 140 org	1.856. 741 org	2.352. 448 org	2.489. 467 Orang	1.428. 262 org	1.717. 116 org	2.154. 246 org	2.364 383 org	127,7	92,4	92,4	95	2.948. 955 org
	Jumlah objek dan daya tarik wisata unggulan yang dikembangkan	5 odtw	7 odtw	8 Odtw	13 Odtw	12 odtw	14 odtw	7 odtw	14 odtw	240	200	87,5	107	11 odtw

- Jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara untuk tahun 2017 ditargetkan sebesar 100.000 sedangkan jumlah kunjungan untuk Wisatawan Nusantara ditargetkan sebesar 2.389.467 (naik 15% dari realisasi kunjungan di tahun 2016).

Namun realisasi yang tercapai untuk kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 75.758 orang (75,75%), dan untuk wisatawan nusantara sebesar 2.288.625 orang (95,78%). Realisasi capaian akumulasi Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap target sebesar 95%.

Salah satu penyebab tidak tercapainya target indikator ini adalah faktor cuaca buruk yang melanda hampir sebagian besar wilayah Aceh. Pada saat perhelatan acara Sail Sabang yang diharapkan mampu mendatangkan kunjungan wisatawan terbesar, dijadwalkan 90 Kapal yacht yang akan mengikuti acara tersebut namun akibat cuaca hujan dan badai hanya 19 yacht yang bisa menghadiri. Pada tahun ini hanya ada 2 Kapal Pesiar yang dapat masuk ke Sabang yang diakibatkan oleh cuaca buruk sedangkan pada tahun 2016 kapal pesiar yang masuk ada 8 kapal.

Pada tahun ini juga ada beberapa daerah di Aceh yang dilanda bencana banjir, hal ini membawa dampak yang besar terhadap jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh.

Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan dalam amanah RPJM (2017) adalah sebanyak 2.948.955 orang. Sedangkan pada Tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan sebesar 2.364.383 orang atau setara dengan 80,18% dari target RPJM (2017).

- Indikator kinerja jumlah obyek wisata unggulan yang dikembangkan, ditargetkan sebanyak 13 objek pada tahun 2017 dan terlaksana sebanyak 14 objek daya tarik wisata (odtw) melalui kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pendukung di obyek-obyek pariwisata unggulan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memang memberikan prioritas bagi kegiatan ini untuk peningkatan fasilitas pendukung di odtw unggulan sehingga kunjungan wisatawan dapat semakin meningkat dan stake holder pariwisata semakin bersemangat untuk mengembangkan industri pariwisata serta sebagai bentuk dukungan dan rangsangan bagi daerah untuk mengembangkan kawasan wisata unggulannya.

Namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Salah satu penyebab tidak dapat terlaksananya kegiatan tersebut adalah karena hambatan administratif yang menyebabkan kegiatan tersebut dibatalkan (keterlambatan dokumen perencanaan).

Indikator obyek wisata unggulan yang dikembangkan dalam amanah RPJMA (2017) adalah sebanyak 11 odtw. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah objek daya tarik wisata (odtw) yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh melalui kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pendukung di obyek-obyek pariwisata sudah mencapai angka 14 buah atau setara dengan 127 % dari target RPJM(2017).

#### **D. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Secara keseluruhan kegiatan yang diembankan oleh pemerintah daerah kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh dapat dilaksanakan dengan baik. Pada tahun anggaran 2017 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dialokasikan anggaran Rp. 140.230.437.515,- (seratus empat puluh milyar dua ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah). Dana tersebut bersumber dari 5 (lima) sumber pembiayaan/dana yaitu Dana PAA, DAU, Otonomi Khusus, Migas dan DAK. Dana PAA adalah penerimaan Pemerintah Aceh dari pendapatan asli daerah. DAU adalah Dana Alokasi Umum merupakan dana perimbangan dari Pusat (APBN), otonomi Khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh dari dana APBN yang berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun. Dana Minyak dan Gas Bumi adalah penerimaan Pemerintah Aceh dari pembagian hasil minyak dan gas bumi, DAK adalah dana alokasi khusus dari APBN kepada Prov/Kab/kota tertentu.

Dari sumber dana di atas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh melaksanakan 11 (sebelas) program/kegiatan yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, serta Program Pengembangan Kemitraan.

Dari 11 (sebelas) program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, terdapat 7 (tujuh) program utama yang menjadi sarana dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Ketujuh program tersebut adalah Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Program Pengembangan Kemitraan.

Dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 108.126.023.633,- atau setara dengan 77,11% dari total pagu dinas secara keseluruhan. Realisasi keuangan dalam kegiatan sebesar Rp. 83.792.361.454,- (77,50%).

Apabila membandingkan antara persentase Capaian Kinerja Organisasi ( 101 %) dengan Persentase capaian Keuangan (77,50%) dimana persentase Capaian Kinerja Organisasi Lebih besar dari Persentase Capaian Keuangan maka dapat dilaporkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh telah melaksanakan kegiatan secara efisien.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2017 sebesar Rp.140.230.437.515,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 110.502.091.836,- (78,80 %) dan realisasi fisik 89,73%.
2. Pagu anggaran yang dialokasikan untuk sasaran strategis kebudayaan dan pariwisata sebesar Rp. 108.126.023.633,- atau setara dengan 77,11% dari total anggaran dinas, dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 83.792.361.454,- (77,50%) dan Capaian Kinerja Organisasi sebesar 101 %, sehingga dapat dikatakan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata aceh telah melaksanakan kegiatan secara efisiensi.
3. Sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh pada tahun 2017 dijabarkan menjadi 5 indikator kinerja, dengan realisasi sebagai berikut;
  - Indikator kinerja Peningkatan aktivitas pelestarian seni budaya yang berskala nasional dan internasional, Pembinaan grup kesenian, Pelestarian Benda Cagar Budaya tercapai dengan realisasi tidak kurang dari 100%.
  - Indikator pengembangan objek dan daya tarik wisata unggulan tercapai 107% dan jumlah kunjungan wisatawan tercapai sebesar 95% dari target yang ditetapkan.
4. Diperlukan konsistensi dan komitmen dari seluruh stakeholder budaya dan pariwisata untuk mengarahkan upaya-upaya pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan Aceh pada satu visi dan *brand* yang sama yaitu Destinasi Wisata Budaya Halal unggulan.




## B. SARAN

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas dimasa mendatang yaitu dengan :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak terkait untuk meningkatkan aksesibilitas, amenitas dan akomodasi yang *berstandart halal industry*.
2. Mendorong investasi pada seluruh sektor industri pariwisata dan budaya sehingga dapat meningkatkan penyerapan lapangan kerja dan ekonomi rakyat.
3. Mendorong tumbuhnya institusi pendidikan formal dan nonformal yang menjadi *supply* sumber daya manusia yang memenuhi standart industri pariwisata.
4. Bersama dengan seluruh stake holder dan instansi terkait menciptakan publikasi yang baik dan tepat tentang pariwisata dan budaya Aceh untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi investasi dan pengembangan industri pariwisata Aceh.

Akhirnya dari laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pimpinan dalam menentukan strategi dan kebijaksanaan yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas dimasa mendatang.

Banda Aceh, 15 Februari 2018  
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH  
  
**Drs. REZA FAHLEVI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197407221993111001



27

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. REZA FAHLEVI, M.Si**  
Jabatan : **KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. H. ZAINI ABDULLAH**  
Jabatan : **GUBERNUR ACEH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2017

Pihak Kedua,

**dr. H. ZAINI ABDULLAH**

Pihak Pertama,

**Drs. REZA FAHLEVI, M.Si**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pendayagunaan dan pemanfaatan warisan budaya, nilai-nilai syariah dan kearifan lokal sebagai sarana pendidikan, penelitian, identitas bangsa dan kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan aktivitas pelestarian seni budaya yang berskala nasional dan internasional</li> <li>- Pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya</li> <li>- Jumlah grup kesenian</li> </ul>	<p style="text-align: center;">9 kegiatan</p> <p style="text-align: center;">12 situs</p> <p style="text-align: center;">99 sanggar</p>
2.	Terlaksananya pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang proporsional dan profesional yang berkelanjutan guna peningkatan kunjungan wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunjungan wisatawan nusantara</li> <li>- Kunjungan wisatawan mancanegara</li> <li>- Jumlah objek dan daya tarik wisata unggulan yang dikembangkan</li> </ul>	<p style="text-align: center;">2.389.467 orang</p> <p style="text-align: center;">100.000 orang</p> <p style="text-align: center;">13 objek</p>

**Program**

1. Program Pengembangan Nilai Budaya
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
4. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
5. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
6. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
7. Program Pengembangan Kemitraan

**Anggaran**

Rp 5.636.380.000

Rp 11.199.448.850

Rp 8.424.368.000

Rp 1.042.120.000

Rp 9.166.656.998

Rp 70.449.619.638

Rp 3.951.240.997

Banda Aceh, 2017

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

Gubernur Aceh  
  
dr. H. ZAINI ABDULLAH

  
Drs. REZA FAHLEVI, M.Si